

BAB IV

DESKRIPSI, PEMBUKTIAN DATA, DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Deskripsi data merujuk pada penjelasan mengenai data yang digunakan dalam suatu penelitian. Metode penelitian kuantitatif deskriptif adalah pendekatan yang berfokus pada memberikan gambaran yang obyektif tentang kondisi tertentu dengan menggunakan angka, baik dalam proses pengumpulan, interpretasi, maupun presentasi data serta hasilnya.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a) Sejarah

Badan Keuangan Daerah (BKD) adalah sebuah entitas yang mendukung dan melaksanakan fungsi keuangan serta tugas-tugas terkait di tingkat daerah. BKD dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Perannya meliputi pengelolaan keuangan dan aset di wilayah daerah, dan kepala BKD juga bertindak sebagai pejabat pengelolaan keuangan daerah dan pejabat penata usahaan barang milik daerah, serta bertanggung jawab sebagai bendahara umum daerah.

Struktur BKD Kabupaten Pamekasan didasarkan pada peraturan daerah terkait, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan sebelumnya, yaitu Nomor 6 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. BKD merupakan hasil penggabungan antara Badan Pengelolaan dan Aset Daerah serta Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan.

Susunan organisasi BKD sesuai dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 72 Tahun 2016 yang mengatur posisi, struktur, fungsi, dan tata kerja keuangan daerah, terdiri dari enam bidang dan satu sekretariat.

1. Bidang pendaftaran, pencatatan, penentuan, dan pengawasan.
2. Bidang penagihan dan penyelesaian sengketa.
3. Bidang perencanaan keuangan.
4. Bidang manajemen aset daerah.
5. Bidang kebijakan keuangan.
6. Bidang pelaporan dan akuntansi.

Kepala BKD memegang peran kunci dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Tugasnya meliputi merumuskan kebijakan, mengawasi pembinaan, koordinasi, pengelolaan, dan pengendalian keuangan dan aset daerah. Untuk mendukung tugasnya, kepala BKD memiliki sekretariat yang membantu dalam pelaksanaan tugas tersebut. Sekretariat tersebut memiliki beberapa subdivisi, yakni:

1. Subdivisi Umum dan Manajemen Pegawai.
2. Subdivisi Perencanaan dan Evaluasi.
3. Subdivisi Keuangan dan Aset.

Bidang pendaftaran, pencatatan, penentuan, dan pengawasan bertanggung jawab atas koordinasi dan pelaksanaan proses pendaftaran, pencatatan, penentuan, dan pengawasan subjek dan objek pajak daerah, serta sumber pendapatan lainnya. Mereka juga memiliki kewajiban untuk memverifikasi perhitungan dan mengeluarkan surat ketetapan pajak daerah. Selain itu, mereka memberikan panduan kepada unit kerja perangkat daerah (SKPD) yang bertanggung jawab atas pengelolaan retribusi daerah, dan memberikan penyuluhan kepada wajib pajak.

b) Visi dan Misi

1. Visi

BPKPD Pemerintah Kabupaten Pamekasan adalah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang Efisien, Efektif, Transparan dan Akuntabel.

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan asset daerah yang tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- b. Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang terukur dan Berkualitas

c) Struktur Organisasi

Secara umum, suatu lembaga tidak dapat beroperasi sendirian. Oleh karena itu, diperlukan struktur organisasi yang dapat mendukung kinerja di berbagai bidang. Dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun 2021 mengenai kedudukan, struktur organisasi, tugas, fungsi, dan prosedur kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, dijelaskan bahwa tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 yang mengubah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Daerah. Ini dilakukan dengan menetapkan posisi, struktur organisasi, tugas, fungsi, dan prosedur kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Struktur ini menggambarkan bagaimana berbagai fungsi, peran, dan aktivitas organisasi telah terkoordinasi dengan baik.

Berikut struktur pada Kantor Badan Pengolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan.



1. Kepala Badan Tugas pokok kepala badan tersebut melibatkan dukungan terhadap Bupati dalam merancang kebijakan, mengelola keuangan dan aset daerah, serta melakukan fungsi pengawasan.
2. Sekretariat, mempunyai tanggung jawab dalam perencanaan dan koordinasi aspek administrasi seperti kepegawaian, hukum, kesehatan, dan lain-lain. Selain itu, juga terlibat dalam manajemen keuangan, komunikasi masyarakat, pengelolaan perpustakaan dan arsip, serta penyusunan laporan kinerja dan keuangan badan
3. Bidang Perbendaharaan, bertugas mengurus fungsi perbendaharaan yang mencakup pembelian langsung, penggajian pegawai, pemberian hibah, dan pembiayaan terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. Bidang Anggaran, memegang tanggung jawab dalam perencanaan dan pengawasan teknis pelaksanaan APBD.
5. Bidang Aset Daerah, bertugas mengelola dan mengurus barang dan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
6. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, bertanggung jawab atas pencatatan transaksi keuangan, pendapatan, pengeluaran, pembiayaan, aset, piutang, dan ekuitas dana, serta penyusunan laporan keuangan daerah sesuai standar akuntansi pemerintah.

7. Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, dan Pengendalian, bertugas mengkoordinasikan dan melaksanakan registrasi, pengumpulan data, penentuan, dan pengawasan pembayaran pajak daerah oleh subjek dan objek pajak, serta pemantauan sumber pendapatan lainnya. Selain itu, juga melakukan pengecekan, perhitungan, dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, serta memberikan bimbingan kepada unit-unit kerja pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan retribusi daerah, serta memberikan informasi dan edukasi kepada wajib pajak.
8. Bidang Penagihan dan Keberatan, bertanggung jawab atas koordinasi dalam pengelolaan dan penerimaan pendapatan dari pajak daerah dan sumber pendapatan lainnya, melaksanakan proses penagihan pajak daerah yang telah lewat tenggat waktu, dan memberikan layanan serta menangani permohonan keberatan terhadap pajak daerah sesuai peraturan yang berlaku.

B. Deskripsi Variabel Penelitian

1. Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan mengacu pada seberapa baik atau efisien pemerintah daerah dalam mengumpulkan PBB dari wajib pajak yang seharusnya membayar. Ini mencakup tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, tingkat penegakan hukum terhadap pelanggaran, dan upaya-upaya administratif untuk meningkatkan pemungutan.

Variabel terkait: Tingkat kepatuhan wajib pajak, tingkat pemungutan PBB, jumlah tunggakan PBB, upaya administratif dalam peningkatan pemungutan.

2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penggunaan tanah dan bangunan yang ada di suatu daerah. PBB biasanya merupakan sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan PAD.

Variabel terkait: Pendapatan dari PBB, efektivitas pemungutan PBB, pertumbuhan pendapatan dari PBB dari tahun ke tahun.

3. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap PAD

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari total PAD yang berasal dari penerimaan pajak bumi dan bangunan. Ini mencerminkan seberapa besar peran PBB dalam mencukupi kebutuhan keuangan daerah.

Variabel terkait: Persentase kontribusi PBB terhadap total PAD, pertumbuhan kontribusi PBB terhadap PAD dari tahun ke tahun.

Analisis efektivitas pemungutan PBB dan kontribusinya terhadap PAD di Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2022 dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang kinerja keuangan daerah dan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah otonom dari sumber-sumber yang ada di wilayahnya, seperti pajak, retribusi, hasil usaha daerah, dan lain-lain. PAD merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu daerah dalam mengelola potensi ekonomi lokalnya.

Variabel terkait: Total PAD, PAD per jenis pajak (termasuk pajak bumi dan bangunan), pertumbuhan PAD dari tahun ke tahun.

Tabel 4.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1.	2018	179.974.568.986,00	222.410.644.049,09	123,58%
2	2019	177.941.072.561,00	219.671.437.717,13	123,45%
3	2020	182.735.353.662,00	232.262.477.004,71	127,10%
4	2021	206.868.469.937,00	205.969.039.947,27	99,57%
5	2022	257.690.872.753,00	231.934.835.122,52	90,01%
Rata-rata				112.74%

Sumber Data: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan (diolah)

Jika dilihat pada tabel 4.1 bahwasanya dalam waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2018-2022 realisasinya mengalami fluktuasi atau biasa disebut naik turun, realisasi yang dicapai tahun 2018-2020 sudah mencapai target yang telah ditentukan namun tahun 2021&2022 realisasi yang dicapai dari pendapatan asli daerah tidak melebihi target yang telah ditetapkan akan tetapi dilihat dari presentase tersebut dapat dikatakan cukup baik.

C. Hasil Penelitian

Data mengenai pencapaian target dan realisasi pajak daerah Kabupaten Pamekasan dari tahun 2018 hingga 2022 menggambarkan bahwa harapan untuk mencapai target belum sepenuhnya terwujud. Hal ini terlihat dalam data berikut:

Tabel 4.2

Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2018	6.100.000.000,00	7.479.709.405,00	122,62%
2	2019	7.177.500.000,00	7.500.644.924,00	104,50%
3	2020	6.000.000.000,00	7.529.269.254,00	104,70%
4	2021	5.960.000.000,00	7.133.982.937,00	119,70%
5	2022	7.000.000.000,00	6.724.644.186,00	96,07%

Sumber Data: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan (diolah)

Dengan melihat tabel di atas, kita bisa melihat perbandingan antara target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan realisasi yang berhasil terkumpul. Dalam beberapa tahun, seperti tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021, realisasi pajak daerah melebihi target yang ditetapkan, sementara pada tahun 2022, realisasi pajak daerah masih di bawah target yang ditetapkan. Hal ini bisa mengindikasikan efektivitas dari kebijakan dan strategi yang diterapkan dalam pengumpulan pajak daerah.

Tabel 4.3

Tingkat Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan

No	Tahun	Target Pajak Bumi dan Bangunan	Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan	Persentase %	Ket
1	2018	6.100.000.000,00	7.479.709.405,00	122,62%	Sangat Efektif
2	2019	7.177.500.000,00	7.500.644.924,00	104,50%	Sangat Efektif

3	2020	6.000.000.000,00	7.529.269.254,00	104.50%	Sangat Efektif
4	2021	5.960.000.000,00	7.133.982.937,00	119.70%	Sangat Efektif
5	2022	7.000.000.000,00	6.724.644.186,00	96.07%	Efektif

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwasanya tingkat efektifitas pajak bumi dan bangunan pada dari 5 tahun terakhir mengalami naik turun (fluktuasi), pada tahun 2018 realisasi yang dicapai Rp. 7.479.709.405,00 dengan presentase tingkat efektifitas sebesar 122,62%, masuk dalam kategori (>100%) atau sangat efektif, dan pada tahun 2019 realisasi yang dicapai oleh pajak bumi dan bangunan Rp.7.500.644.924,00 dengan presentase tingkat efektifitasnya sebesar 104,50% masuk dalam kategori (>100%) atau sangat efektif. Namun realisasi yang dicapai pada tahun 2020 sebesar Rp. 7.529.269.254,00 dengan presentase tingkat efektifitasnya sebesar 104.50% masuk dalam kategori (>100%) atau efektif. Realisasi yang dicapai pada tahun 2021 sebesar Rp. 7.133.982.937,00 dengan persentase tingkat efektifitasnya sebesar 119.70% masuk dalam kategori (>100%) atau efektif. Namun pada tahun 2022 realisasi yang dicapai sebesar Rp. 6.724.644.186,00 dengan persentase tingkat efektifitasnya sebesar 96.07% masuk dalam kategori Efektif.

Tabel 4.4
Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan

No	Tahun	Realisasi PAD	Realisasi PBB	Presentase	Ket.
1	2018	222.410.644.049,09	7.479.709.405,00	29,74%	Cukup
2	2019	219.671.437.717,13	7.500.644.924,00	29,29%	Cukup
3	2020	232.262.477.004,71	7.529.269.254,00	30,84%	Sedang
3	2021	205.969.039.947,27	7.133.982.937,00	28,87%	Cukup
5	2022	231.934.835.122,52	6.724.644.186,00	34,50%	Sedang

Dalam tabel tersebut, terlihat bahwa pendapatan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2018 mencapai Rp. 7.479.709.405,00 dengan kontribusi sebesar 29,74% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2019, pendapatan pajak bumi dan bangunan Rp. 7.500.644.924,00 dengan kontribusi sebesar 29,29%. Tahun 2020, pendapatan pajak bumi dan bangunan Rp. 7.529.269.254,00 dengan kontribusi 30,84%. Pada tahun 2021, pendapatan pajak bumi dan bangunan mencapai Rp. 7.133.982.937,00 dengan kontribusi 28,87%. Pada tahun 2022, pendapatan pajak bumi dan bangunan mencapai Rp. 6.724.644.186,00 dengan kontribusi sebesar 34,50%.

Hasil Wawancara

Dari data yang saya terima, penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami fluktuasi?

“Benar, penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) memang mengalami fluktuasi. Fluktuasi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan nilai jual objek pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan kondisi ekonomi secara umum. Perubahan kebijakan pemerintah juga bisa mempengaruhi penerimaan PBB dari tahun ke tahun.”

Pada saat pajak bumi dan bangunan itu mengalami fluktuasi apakah mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

“Ya, fluktuasi dalam penerimaan PBB tentu mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). PBB adalah salah satu komponen penting dalam PAD, sehingga perubahan dalam penerimaan PBB akan berdampak langsung pada total PAD. Ketika penerimaan PBB menurun, PAD bisa mengalami penurunan, begitu pula sebaliknya.”

Apakah setiap tahunnya selalu efektif terkait pemungutan pajak bumi dan bangunan?

“Efektivitas pemungutan PBB bisa bervariasi setiap tahun. Efektivitas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kebijakan pemerintah, sistem administrasi pajak, tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta upaya dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan PBB. Meski ada tahun-tahun yang menunjukkan hasil yang baik, ada juga tantangan yang dihadapi dalam pemungutan pajak ini.”

D. Pembahasan

1. Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2022

Selama periode 2018-2022, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi Kabupaten Pamekasan. Evaluasi terhadap tingkat efektivitas pemungutan PBB dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dua aspek utama: tingkat kepatuhan wajib pajak dan kinerja kolektor pajak.

Selama periode tersebut, terdapat berbagai faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap PBB di Kabupaten Pamekasan. Pertama, faktor tingkat pengetahuan masyarakat tentang kewajiban pajak dan dampaknya bagi pembangunan daerah dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan masyarakat, kemungkinan kepatuhan pajak juga meningkat. Kedua, faktor kesadaran pajak, yang mencakup kesadaran moral dan tanggung jawab sosial wajib pajak dalam membayar pajak, juga berpengaruh. Ketiga, kondisi ekonomi masyarakat juga dapat menjadi faktor yang memengaruhi kepatuhan, seperti tingkat penghasilan dan stabilitas ekonomi.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak:

- a. Angka seperti 29,74%, 30,84%, dan 34,50% adalah tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pamekasan selama periode 2018-2022.
- b. Angka-angka tersebut menunjukkan persentase dari jumlah PBB yang berhasil dipungut dibandingkan dengan jumlah yang seharusnya dipungut oleh pihak berwenang.

Selain dari sisi kepatuhan wajib pajak, efektivitas pemungutan PBB juga sangat bergantung pada kinerja kolektor pajak. Evaluasi terhadap kinerja kolektor meliputi beberapa aspek kunci. Pertama, pelaksanaan tugas kolektor harus sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan. Kolektor harus dapat melakukan kegiatan pemungutan pajak dengan efisien dan tepat waktu. Kedua, tingkat kecepatan dalam menagih pembayaran juga menjadi indikator penting. Semakin cepat pembayaran dapat ditagih, semakin besar kemungkinan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Ketiga, tingkat keprofesionalan dalam menangani masalah-masalah terkait pajak juga merupakan aspek penting. Kolektor harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait pembayaran pajak dengan cepat dan adil, serta memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Dari hasil evaluasi tingkat efektivitas pemungutan PBB dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pamekasan selama periode 2018-2022, dapat disimpulkan bahwa peran tingkat kepatuhan wajib pajak dan kinerja kolektor pajak sangatlah penting. Penyuluhan yang lebih intensif kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pajak, serta peningkatan kinerja kolektor pajak dalam melakukan pemungutan pajak dengan efektif dan efisien, dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pencapaian target pendapatan pajak daerah, khususnya dari PBB.

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan nilai jual objek pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan kondisi ekonomi secara umum. Kebijakan pemerintah juga berperan dalam mempengaruhi penerimaan PBB dari tahun ke tahun. Fluktuasi penerimaan PBB ini berdampak langsung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai salah satu komponen penting PAD, perubahan dalam penerimaan PBB akan mempengaruhi total PAD. Ketika penerimaan PBB menurun, PAD juga mengalami penurunan, dan sebaliknya, peningkatan penerimaan PBB biasanya berdampak positif terhadap PAD, meskipun dampaknya juga tergantung pada proporsi PBB dalam keseluruhan PAD dan kinerja komponen pendapatan lainnya.

Efektivitas pemungutan PBB dapat bervariasi setiap tahun dan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, sistem administrasi pajak, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta upaya dan strategi pemerintah daerah. Penentuan target penerimaan PBB dilakukan dengan mempertimbangkan potensi objek pajak di daerah, tren penerimaan pajak sebelumnya, serta kebijakan dan peraturan yang berlaku. Analisis data historis dan proyeksi ekonomi juga digunakan untuk menetapkan target yang realistis. Untuk mencapai target penerimaan PBB, beberapa strategi diterapkan, seperti peningkatan sistem informasi dan teknologi dalam administrasi pajak, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, kerjasama dengan lembaga terkait, serta pemberian insentif atau diskon bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu.

Hasil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dialokasikan untuk berbagai keperluan pembangunan daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Selain itu, PAD juga digunakan untuk mendukung operasional pemerintahan daerah dan program-program yang bertujuan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Pengalokasian PAD dilakukan berdasarkan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat melalui proses perencanaan yang transparan dan akuntabel.

2. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2022

Kontribusi PBB terhadap PAD di Kabupaten Pamekasan selama periode 2018-2022 merupakan cerminan dari efektivitas pemungutan pajak tersebut. Untuk mengevaluasi kontribusi PBB, perlu diperhatikan pertumbuhan pendapatan dari tahun ke tahun serta persentase kontribusi PBB terhadap total PAD.

Dalam evaluasi kontribusi PBB, pertumbuhan pendapatan dari PBB selama periode tersebut menjadi indikator utama. Pertumbuhan yang stabil atau bahkan meningkat menunjukkan bahwa PBB memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah.

Dengan demikian, dari hasil evaluasi pendapatan dan persentase kontribusi PBB terhadap total PAD, dapat disimpulkan bahwa PBB memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pamekasan selama periode 2018-2022. Meskipun terjadi fluktuasi dalam kontribusi PBB terhadap PAD cenderung meningkat atau setidaknya stabil, menunjukkan efektivitas dan konsistensi dalam pemungutan pajak. Evaluasi terus-menerus perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kontribusi PBB terhadap PAD terus meningkat dan efektivitas pemungutan pajak tetap terjaga.